

**KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR ATAS  
PIUTANG BERUPA TAGIHAN BEA MASUK PERKARA KEPAILITAN  
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 49  
PK/PDT.SUS-PAILIT/2013)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaaan

Dalam

Ilmu Hukum

Oleh:

**DINA INDRI LISNAWATI DEWI**

**NIM. 115010107111056**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Sistemika Penulisan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
<b>1. Kajian tentang Kepailitan dan PKPU.....</b>	<b>10</b>
<b>Pengertian Hukum Kepailitan .....</b>	<b>10</b>
<b>1.1 Prinsip-Prinsip dalam Kepailitan.....</b>	<b>12</b>
<b>1.2 Kreditor dalam Kepailitan.....</b>	<b>14</b>
<b>1.3 Kajian Umum tentang PKPU.....</b>	<b>18</b>
<b>2. Kajian tentang Pengadilan Niaga .....</b>	<b>22</b>
<b>3. Kajian tentang Perpajakan.....</b>	<b>26</b>
<b>2.1 Pengertian pajak .....</b>	<b>26</b>

2.2 Fungsi Pajak.....	28
2.3 Asas-asas dalam pemungutan pajak.....	28
2.4 Pembagian Pajak .....	29
2.4.1 Berdasarkan Golongan.....	30
2.4.2 Berdasarkan Wewenang Pungutan .....	30
2.4.3 Berdasarkan Sifat .....	32
4. Kajian Umum Tentang Kepabeanan .....	33
5. Tagihan Pabean .....	33
6. Kajian Umum Tentang Bea Masuk .....	36
5.1 Definisi Bea Masuk .....	36
5.2 Fungsi Bea Masuk .....	37
5.3 Subjek dan Objek Bea Masuk .....	38
7. Kajian Umum Peninjauan Kembali dalam Perkara Kepailitan.....	38
7.1 Definisi tentang Peninjauan Kembali.....	38
7.2 Proses Peninjauan Kembali Dalam Kepailitan .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	44
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	46
E. Teknis Analisis Bahan Hukum .....	47
F. Definisi Konseptual .....	47



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Kasus Kedudukan Kreditur Sebagai Salah Satu Kreditur

#### Atas Piutang Berupa Tagihan Bea Masuk Dalam Perkara Kepailitan

#### (Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49

#### PK/PDT.SUS-PAILIT/2013)..... 48

### B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasasi

#### Mahkamah Agung No. 252K/PDT.SUS/2012 Sesuai Dengan Hukum

#### Positif Di Indonesia

#### B.1.Keberatan Atas Bagian KPPBC Tipe Madya Pabean

#### ..... 57

#### B.2. Pertimbangan Majelis Hakim ..... 62

#### B.3 Bunyi Putusan ..... 64

#### B.4 Analisis Putusan Kasasi ..... 64

### C. Analisis Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 ..... 67

#### A. C.1

#### B. Saran..... 81

## DAFTAR PUSTAKA ..... 82

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
5. Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir)  
kepailitan PT. Kizone International (dalam pailit) perkara no.  
13/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST



## KATA PENGANTAR

Merupakan saat yang sangat tepat untuk mengucapkan syukur “*ALHAMDU LILLAH RABBIL ‘AALAMIIN*” kehadiran Allah SWT karena atas perkenan dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat selsai menullis skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR ATAS PIUTANG BERUPA TAGIHAN BEA MASUK PERKARA KEPAILITAN (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013)”.

Sangat disadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak baik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, keluarga dan juga rekan-rekan sekalian. Atas alas an tersebut maka dalam kesempatan ini wajar bila penulis ingin menyampaikan implementasi rasa terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan baik secara moril, materiil maupun keilmuan yang telah disumbangkan kepada penulis.

Terima kasih sebesar-besarnya penulis *hatur*-kan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Guwadi, S.H.,M.Si dan Ibunda Almarhumah Kristianti Pujiastuti,S.Sos, atas curahan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis.

Tidak lupa penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada kakak-kakak, Hari Kristianto Wahyu Kurniawan, S.H.,M.H. dan Erny Arianti Dewi, S.Psi, yang selalu memberikan semangat yang mendorong motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepada Bapak Imam Ismanu, S.H.,MS. dan Ibu Amelia Srikusumadewi,S.H.,MKn, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih atas bimbingannya, petunjuk, kesabaran, ilmu yang bapak dan ibu tularkan, keramahan dan waktu yang sengaja Bapak dan Ibu luangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.

Dengan setulus hati penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, SH.M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



2. Ibu Djumikasih SH.M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis
3. Ibu Riana Susmayanti,S.H.,M.Hum. selaku dosen wali penulis. Terimakasih atas arahan serta bimbingan studi dan akademik yang ibu berikan dengan sabar kepada penulis.
4. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Keluarga Besar Perdata Ekonomi dan Bisnis (*BLC*).
8. Keluarga Besar Asian Law Student's Association (*ALSA LC UB*). *ALSA Always be one!*
9. Teman-teman dan Sahabat terdekat secara khusus Irdinta Nurhabsari, Ruliani Aida, Mirza Indira, Rizka Annisa, Kinnanti Alrian, Retnosari W, Nisa Setyo, Adriano Opung, Donny Satya, Ega Kesatria, Agastya Pradipta, Rachman Haris, Yogi Arie, Andrew Damara dan Cosman Oktaniel.
10. Juga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidaklah berlebihan jika penulis berharap agar skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi orang lain yang membacanya, meski penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan. Dengan demikian kritik serta saran yang konstruktif sangat penulis dambakan demi lebih baiknya penulisan skripsi ini dan untuk itu diucapkan terima kasih.

Malang, juli 2015

Penulis

Dina Indri Lisnawati Dewi

# LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi** : KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR ATAS PIUTANG BERUPA TAGIHAN BEA MASUK PERKARA KEPAILITAN (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013)

**Identitas Penulis** :

- a. Nama : Dina Indri Lisnawati Dewi
- b. NIM : 115010107111056
- c. KONSENTRASI : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui pada tanggal :

**Ketua Majelis**

**Anggota**

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,M.S

Imam Ismanu, SH.,MS.

NIP.195005261980022001

NIP. 195107271980021 001

**Anggota**

**Anggota**

M. Zairul Alam, S.H.,M.H

Amelia Sri Kusuma Dewi,S.H.,M.Kn..

NIP. 197409092006041002

NIP. 19811214 2008012 010

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si.

NIP. 196208051 198802 1 001



## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi**

**: KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI SALAH  
SATU KREDITUR ATAS PIUTANG BERUPA  
TAGIHAN BEA MASUK PERKARA  
KEPAILITAN (ANALISIS YURIDIS  
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR  
49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013)**

**Identitas Penulis**

**:**

- a. Nama : Dina Indri Lisnawati Dewi
- b. NIM : 115010107111056
- c. KONSENTRASI : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Disetujui pada tanggal**

**:**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

IMAM ISMANU, SH.,MS.

AMELIA SRI KUSUMA DEWI,SH.,MKn

NIP. 195107271980021 001

NIP. 19811214 2008012 010

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Ekonomi dan Bisnis

DJUMIKASIH, S.H.,M.Hum

NIP. 19721130 199802 2 001

**KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR ATAS  
PIUTANG BERUPA TAGIHAN BEA MASUK DALAM PERKARA  
KEPAILITAN**

**(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI NOMOR 252K/PDT.SUS/2012 dan  
PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013)**

Dina Indri Lisnawati Dewi, Imam Ismanu SH., MS.,

Amelia Srikusumadewi SH., M.kn

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email : dinaindrild@yahoo.com

**ABSTRAKSI**

KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR ATAS PIUTANG BERUPA TAGIHAN BEA MASUK PERKARA KEPAILITAN (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013), Dina Indri Lisnawati Dewi, Imam Ismanu, SH.MS, Sri Kusuma Dewi SH.MKn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum yang terdapat pada putusan peninjauan kembali nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 terkait adanya ketidaksuaian antara apa yang dituliskan di dalam peraturan perundang-undangan dengan sesuatu yang terjadi di kenyataan. Pokok utama permasalahannya adalah pihak bea masuk (sebagai pajak) yang seharusnya berkedudukan sebagai kreditor preferen, ternyata di dalam putusan Peninjauan Kembali tidak diakui eksistensinya.

Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga telah sesuai dengan hukum Kepailitan dan PKPU? (1) Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 252K/PDT.SUS/2012; (2) Dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013.

Kemudian jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan "*statute approach*", yaitu pendekatan melalui perturan perundang-undangan. Penulis juga menggunakan pendekatan "*conceptual approach*" yaitu pendekatan dengan menganalisa konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini.

Putusan Peninjauan Kembali telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tidak memberikan bagian harta pailit kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang selaku organ negara berstatus sebagai kreditor preferen.

Kata kunci: kedudukan bea masuk dalam perkara kepailitan



**THE COUNTRY'S POSITION AS ONE OF THE CREDITORS OF  
RECEIVABLES IN THE FORM OF IMPORT DUTY BILL IN  
BANKRUPTCY  
JURIDICAL ANALYSIS of the DECISION of the CASSATION (NO.  
252K/PDT. SUS/2012 and REVIEW NUMBER 49 PK/PDT. SUS-  
BANKRUPT/2013)**

Dina Indri Lisnawati Dewi, Imam Ismanu, SH.MS,  
Sri Kusuma Dewi SH.MKn.  
Faculty Of Law, University Of Brawijaya  
Email: dinaindrild@yahoo.com

**ABSTRACT**

THE COUNTRY'S POSITION AS ONE OF THE CREDITORS OF RECEIVABLES IN THE FORM OF BANKRUPTCY CASES IMPORT DUTIES BILL (JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT REVIEW NUMBER 49 PK/PDT. SUS-BANKRUPT/2013), Dina Indri Lisnawati Dewi, Imam Ismanu, SH.MS, Sri Kusuma Dewi SH.MKn.

In this thesis, writer raised legal issues that are found on judicial review number 49 PK / PDT.SUS-PAILIT / 2013 related to the irrelevant between what in legislation with something that happens in fact. Main of the problem is the import duties ( as a tax ) that is supposed to be a preferred creditor that appeared in judicial review is doesn't existence.

This paper raised the issue of the formulation of the basic considerations: whether the Commercial Court judges were in accordance with the law of Bankruptcy and PKPU? (1) in the Supreme Court of Cassation Ruling number 252K/PDT. SUS/2012; (2) In a review of the Supreme Court Verdict number 49 PK/PDT. SUS-BANKRUPTCY/2013.

Then the type of research in this thesis is the juridical normative research, with the approach of the "statute approach", the approach through legislation. The author also uses the approach of "conceptual approach" by analyzing the concepts that relate directly to the title of this research.

The verdict Review has violated the applicable legislation, namely article 2 paragraph (1) Act No. 37 of 2004 about bankruptcy and Suspension of payment, article 39 of the Act No. 10 of 1995 on customs, as amended by Act No. 17 of 2006, and section 1137 KUHPperdata, for not giving a part of property in bankruptcy to the Office of supervision and the Ministry of customs and Excise Customs Vice Type A State organ as the Tangerang's status as a preferred creditor.

**Keywords:** position of the import duties in the case of bankruptcy



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut R. Subekti, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.<sup>1</sup> Secara etimologis, Kepailitan berasal dari kata pailit atau bangkrut yang menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan berarti *“keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya”*. Dalam hukum positif, pengertian tentang Kepailitan diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang menyatakan *“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”*.<sup>2</sup>

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.<sup>3</sup> Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena karena harta debitor sudah habis diambil oleh

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 28.

<sup>2</sup> Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443.

<sup>3</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Pailit: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 2.

kreditor yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor dan debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut timbulah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.<sup>4</sup>

Upaya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan yang diajukan oleh pihak kreditor. Dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitur akan dinyatakan sebagai harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (yang selanjutnya disebutkan Undang-undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa:

“kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu”<sup>5</sup>

Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang prosedur kepailitan mempunyai tujuan melakukan pembagian antara para kreditor dari kekayaan debitur. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor, sesuai dengan hak masing-masing<sup>6</sup>

Di dalam KUH Perdata tingkat kedudukan kreditor dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal di dalamnya, yaitu pertama kreditor preferen (istimewa atau *privilege*) yaitu kreditor yang oleh Undnag-undnag diberi tingkatan yang lebih tinggi dari oada kreditor lainnya semata-mata yang berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam pasal

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 4.

<sup>5</sup> Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, No. 37 Tahun 2004, Pasal 21.

<sup>6</sup> Kartini Mulyadi, “Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan” (Makalah Seminar tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 29 April 1998).



1139 KUHPerdato dan pasal 1149 KUHPerdato. Kedua terdapat kreditor separatis (*secured creditor*) yaitu kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, yang artinya para kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya dinyatakan pailit dan kemudian yang ketiga adalah kreditor konkuren (*insecured creditor*) yang artinya kreditor konkuren tidak memiliki jaminan secara khusus dan tidak memiliki hak istimewa.

Proses kepailitan tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan negara sebagai Kreditor Preferen. Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hak negara atas utang pajak merupakan hak istimewa yang dikecualikan atas dasar undang-undang untuk mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari hak jaminan, yang terdiri dari gadai, hipotik atau fidusia dan hak tanggungan. Dengan adanya sifat hak istimewa untuk mendahului untuk pelunasan utang pajak daripada hak jaminan, dimana preferen atau sifat didahulukan merupakan ciri pokok dari hak jaminan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan<sup>7</sup>, Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pabean atas barang-barang impor yang belum dilunasi. Tagihan pabean tersebut meliputi bea masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan. Melalui undang-undang tersebut, Negara ditempatkan sebagai kreditor preferen sebagai kreditor yang diistimewakan sehingga berhak untuk mendapatkan pelunasannya terlebih dahulu ketika terjadi kepailitan. Namun sebaliknya, berdasarkan data-

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Tentang Kepabeanan, UU Nomor 10 Tahun 1995, LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612.



data yang penulis kumpulkan, seringkali negara dikesampingkan bahkan ada kasus dimana tagihan tidak mendapat pelunasan.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1137 KUH Perdata dalam suatu proses pembebasan harta pailit maka tagihan yang pertama kali akan dibayar adalah terhadap tagihan hak negara, selanjutnya kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, serta upah pekerja. Hal ini telah mengalami pergeseran seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-VI/2008. Dalam putusan tersebut, yang perlu didahulukan pembayarannya dalam kepailitan adalah upah pekerja (buruh) karena berbeda dengan tagihan lainnya karena para pekerja (buruh) hanya bergantung pada upahnya tersebut, sedangkan negara masih bisa mencari sumber pendapatan yang lainnya seperti pajak penghasilan, PPn, pajak bumi dan bangunan, cukai dan bea masuk.

Untuk mempertajam kajian dalam penelitian yang akan dilakukan maka penulis akan mengangkat sebuah contoh kasus terkait tagihan kepabeaan dalam kepailitan PT. Kizone International. Bermula dari status hukum PT. Kizone International yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adanya ketidaksuai antara apa yang dituliskan di dalam peraturan perundang-undangan dengan sesuatu yang terjadi di kenyataan. Permasalahannya adalah bea masuk (sebagai pajak) yang seharusnya berkedudukan sebagai kreditur preferen, ternyata di dalam putusan Peninjauan Kembali tidak diakui eksistensinya. Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan peninjauan kembali nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 26 Juni 2014, yang pada intinya telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PT. Bank SBI Indonesia sehingga terjadi perubahan besaran pembagian harta pailit PT. Kizone International dalam Daftar Pembagian Harta Pailit. Dimana Bea cukai yang seharusnya mendapatkan pembagian harta pailit sebesar Rp 3.045.650.857,14

dikarenakan adanya putusan peninjauan kembali tersebut, maka Bea dan Cukai (dhi. KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang) yang berdasarkan undang-undang nyata-nyata berkedudukan sebagai kreditur preferen justru sama sekali tidak mendapatkan bagian sama sekali. Oleh karenanya, penulis mengangkat issue tersebut di dalam penelitian ini.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian melalui penulisan ilmiah ini dengan judul **“KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR ATAS PIUTANG BERUPA TAGIHAN BEA MASUK DALAM PERKARA KEPAILITAN (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI NOMOR 252K/PDT.SUS/2012 dan PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan singkat tentang latar belakang masalah, maka yang dapat diangkat sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga telah sesuai dengan hukum Kepailitan dan PKPU?

1. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 252K/PDT.SUS/2012;
2. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 252K/PDT.SUS/2012 dan peninjauan kembali putusan nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 sudah sesuai dengan hukum Kepailitan dan PKPU.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan dibidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Kepailitan terkait dengan kedudukan kreditur di dalam kepailitan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan serta informasi yang berguna sebagai referensi melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan kedudukan kreditor dalam kepailitan.

- b. Bagi Mahasiswa dan Akademisi



- 1) Penelitian ini dapat dijadikan dan berguna sebagai metode pembelajaran di dalam wacana pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang ingin menyelesaikan tugas akhir.
- 2) Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan sebagai wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.
- 3) Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum Perdata Ekonomi dan bisnis khususnya terkait tentang kepailitan.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap Lembaga Pemerintahan, Istitusi Peradilan termasuk Aparat Penegak Hukm lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum, terhadap kepentingan publik.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

### 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memuat tentang: pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

### 4. BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi mengenai pembahasan bagaimana kedudukan negara sebagai salah satu kreditur atas piutang negara berupa tagihan bea masuk dalam pembagian harta kepailitan dan selanjutnya penulis akan membahas bagaimana penyelesaian tagihan utang bea masuk dalam kepailitan.

### 5. BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

##### 1.1 Pengertian Hukum Kepailitan

Pengertian tentang Kepailitan diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang menyatakan “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang*”.<sup>1</sup>

Menurut Retnowulan dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>2</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, **kepailitan** atau *bankruptcy* adalah:

*“1. The statutory procedury, usually triggered by insolvency, by which a person is relieved of most debts and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation for the benefit of that person's creditors;*

<sup>1</sup> Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443.

<sup>2</sup> Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, 1996. Hlm. 85

2. *The fact of being financially unable to pay one's debts and meet one's obligations; insolvency.*"<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempoo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan”<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan permohonan pailit dapat diajukan oleh pihak – pihak sebagai berikut:

- a. Debitor;
- b. Kreditor, baik satu maupun lebih;
- c. Kejaksaan, untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya adalah bank;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. Menteri keuangan, dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

## 1.2 Prinsip-Prinsip dalam Kepailitan

<sup>3</sup> Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*, USA, West Group, 7th ED, 1999

<sup>4</sup> Ahmad Yani dan Gunawan, Widjaja, *Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal 11

Menurut Satjipto Raharjo, prinsip hukum dinyatakan sebagai jantung peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.<sup>5</sup>

Berikut beberapa prinsip dalam hukum kepailitan, yaitu:

a. *Prinsip Paritas Creditorium*

Menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.<sup>6</sup>

b. *Prinsip Pari Passa Pro Rata Parte*

Prinsip ini berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>7</sup>

c. *Prinsip Structured Pro Rata*

Prinsip ini disebut juga dengan istilah structured creditors yang merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.<sup>8</sup>

d. *Prinsip Debt Collection*

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo (1986), *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung. Hal 85

<sup>6</sup> Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003. Hal. 135

<sup>7</sup> *Ibid*, hl, 73-74

<sup>8</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, 2007. hlm 5-10



Prinsip debt collection (debt collection principle) adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. menurut Setiawan, peraturan kepailitan pada prinsipnya adalah debt collection law dan bahwa kepailitan merupakan *collective action* dalam debt collection. Debt collection principle merupakan suatu prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya.<sup>9</sup>

e. *Prinsip Utang*

Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan menentukan karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditor.<sup>10</sup>

f. *Prinsip Debt pooling*

Merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*)<sup>11</sup>

### 1.3 Kreditor dalam Kepailitan

<sup>9</sup> M.Hadi Subhan. Hlm 41

<sup>10</sup> Ibid, hlm 34

<sup>11</sup> M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm 41

Kreditor dalam kepailitan sesuai pasal 1 angka 2 UU Kepailitan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang – undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU tersebut, dapat dijabarkan unsur-unsur kreditor adalah sebagai berikut:

- a. Orang;
- b. Yang mempunyai piutang;
- c. Piutang yang dapat ditagih dimuka pengadilan;
- d. Piutang timbul dari perjanjian; atau
- e. Piutang timbul dari undang – undang.

Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam KUH Perdata Kreditor diklasifikasikan 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:

a. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.<sup>12</sup>

b. Kreditor preferen (yang distimewakan)

Kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak

<sup>12</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, 2007, hal 5

istimewa, yaitu suatu hak oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (pasal 1134 KUHPerdato)<sup>13</sup>

c. Kreditor Separatis

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUHPerdato disebut dengan nama gadai dan hipotek.<sup>14</sup>

Menurut pasal 1139 KUH Perdata, Hak Istimewa kreditor dapat timbul dari Hak Istimewa terhadap benda-benda tertentu, yaitu<sup>15</sup>

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu daripada gadai dan hipotik;
2. Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang yang masih harus dibayarkan kepada seorang tukang;
6. Apa yang telah diserahkan kepada seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
7. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
8. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milih atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berhutang.
9. Penggantian – penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai – pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Hak istimewa selanjutnya diatur dalam pasal 1149 KUHPerdato yaitu hak – hak istimewa atas semua benda bergerak dan benda tak bergerak pada umumnya, yaitu:

<sup>13</sup> Pasal 1134 KUH Perdata

<sup>14</sup> *Op.cit. hal.7*

<sup>15</sup> Pasal 1139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata



- a. Biaya-biaya perkara, yang disebabkan pevelangan dan penyelesaian suatu warisan.  
Biaya-biaya tersebut didahulukan dari gadai dan hipotik.
- b. Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, bila biaya-biaya tersebut dinilai terlampau tinggi;
- c. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
- d. Upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun berjalan, beserta uang-uang yang harus dibayar oleh majikan baik kepada buruh maupun kepada keluarga buruh;
- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan;
- f. Piutang-piutang pengusaha sekolah berasrama untuk tahun yang penghabisan;
- g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan oarng yang terampu terhadap wali dan pengampu mereka yang berkaitan dengan pengurusan mereka, dan tidak dapat diambil pelunasan dari hipotik dan lain jaminan.

Selanjutnya dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak dijelaskan bahwa Negara mempunyai hak mendahulu untuk hutang pajak atas barang-barang Penanggung pajak.<sup>16</sup> Negara memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang dimuka umum sedangkan pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.<sup>17</sup> Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.<sup>18</sup> Untuk prioritas kreditor dengan hak istimewa tersebut menurut pasal 1138 KUH Perdata bahwa hak-hak

<sup>16</sup> Pasal 21 ayat (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>18</sup> Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 91

istimewa mengenai benda tertentu didahulukan dari hak-hak istimewa mengenai seluruh benda pada umumnya. Oleh karena itu berdasarkan KUH Perdata kedudukan kreditor adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Gadai dan hipotik berada pada kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan kreditor dengan hak istimewa;
- b. Hak istimewa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari gadai dan hipotek, jika dinyatakan demikian oleh undang-undang;
- c. Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintahan untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak itu diatur di berbagai Undang-undang Khusus yang mengenai hal-hal itu (pasal 1137 KUHPerdata);
- d. Hak istimewa mengenai barang tertentu lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa mengenai seluruh barang pada umumnya.

#### **1.4 Kajian Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Upayanya antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
- 2) Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
- 3) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- 4) Mengajukan perdamaian dalam PKPU:

<sup>19</sup> Albert Richi Aruan, *Kedudukan Negara atas Utang Pajak PT. ARTIKA OPTIMA INTI dalam Kasus Kepailitan*, Tesis tidak diterbitkan, 2010, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 49

<sup>20</sup> Man S. Satrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 202

- 5) Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- 6) Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Debitor dalam memilih sebuah alternatif dari pilihan tersebut, maka pilihan alternatif terbaik adalah dengan mengajukan permohonan PKPU. PKPU harus diajukan oleh debitor sebelum adanya putusan pailit.<sup>21</sup> Apabila putusan pailit telah diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut maka debitor tidak lagi dapat mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan debitor sendiri bisa mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan permohonan PKPU dimana dalam keadaan yang demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.

Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>22</sup> Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

UUK menyebutkan bahwa yang berhak untuk memohon PKPU adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) UUKPKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU yang dimaksudkan dalam pasal 222 UUKPKPU harus diajukan debitor

---

<sup>21</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi revisi berdasarkan Undnag-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, 2008) halaman 221

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Pengantar Huukum Bisnis*, (Bndung: Aditya Bakti, 2001). Hlm. 82



kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor sendiri serta advokatnya dan juga disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Dan pada sidang yang dimaksud, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor, beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

PKPU terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Penundaan sementara kewajiban pembayar utang

Apabila debitor mengajukan permohonan PKPU sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, Majelis hakim harus segera mengabulkannya paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan.<sup>23</sup> Sedangkan dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU selambat-lambatnya dua puluh hari sejak didaftarkan permohonan. Pengadilan kemudian harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus.<sup>24</sup> Putusan pengadilan Niaga tentang PKPU sementara ini berlaku selama maksimum empat puluh lima hari dan setelah itu diputuskan apakah PKPU tersebut dapat dilanjutkan menjadi PKPU secara tetap.

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang bersangkutan untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke empat puluh

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ps. 225 ayat (2)

<sup>24</sup> *Ibid*, ps. 225 ayat (3)

lima terhitung sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara.<sup>25</sup> Dalam sidang tersebut akan diputuskan apakah dapat diberikan PKPU secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian.

## 2. Kajian Umum tentang Pengadilan Niaga

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu bab ketiga tentang Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Adanya penambahan bab ini dikarenakan semakin maju perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga menimbulkan dampak pada perkembangan hukum di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 berdampak perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan terhadap penyelesaian hutang piutang.<sup>26</sup> Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 24 April 1998 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Pengadilan Niaga merupakan pembedaan atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri tetapi masuk pada bab V tentang Ketentuan Lain-Lain mulai dari pasal 299 sampai dengan pasal 303.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, pasal 225 ayat (4)

<sup>26</sup> Gunawan, Widjaya, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, Forum Sahabat 2009. Hlm 1.

Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 diatur pada pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- b. Memeriksa dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang.

Di dalam pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausa arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausa arbitrase. Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Kewenangan yang dimaksud yaitu selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula



memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>27</sup>

Hal tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* digariskan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan extra judicial atas klausa Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan.

Kompetensi Pengadilan Niaga termasuk kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Yang dimaksudkan dengan kompetensi relatif dimiliki oleh Pengadilan Niaga adalah berdasarkan pasal 3 ayat (1) UUKPKPU No. 37 Tahun 2004 dimana “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”.<sup>28</sup> Artinya dari lima Pengadilan Niaga yang ada sampai saat ini, maka hanya Pengadilan Niaga pada wilayah hukumnya masing-masing yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan pengecualian terhadap kompetensi relative tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (2) sampai (5) UU No. 37 Tahun 2004 merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan niaga. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Kemudian kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. pengaturan tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga adalah pada pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus

<sup>27</sup> Pasal 280 ayat (2) Peraturan pengganti Undang-Undang Rrepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998

<sup>28</sup> pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004

permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah Pengadilan umum yang menyelesaikan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian di pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

### 3. Kajian tentang Perpajakan

#### 3.1 Pengertian pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH bahwa “ pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>30</sup>

Pemungutan pajak dilakukan dengan berdasar pada konstitusi yaitu pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

<sup>29</sup> *Ibid* pasal 300 ayat (1)

<sup>30</sup> Prof. Dr. Rochat Soemitro,SH. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*,1990. Hlm. 5

pajak merupakan pungutan yang sifatnya memaksa, bunyi selengkapnya sebagai berikut:  
*“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.*

Yang artinya bahwa walaupun pungutan pajak bersifat memaksa, namun tetap tidak boleh melupakan syarat yuridisnya yaitu pungutan harus dilakukan atas dasar peraturan perundang-undnagan atau hukum pajak yang berlaku, sehingga kedudukan hukum pajak merupakan syarat penting pelaksanaan pungutan pajak yang sesuai dengan konstitusi.

Dalam tataran hukum positif, istilah pajak dijumpai dalam beberapa undang-undang, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, khususnya Pasal 1 angka 1 menyatakan Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan, khususnya Pasal 1 angka 2 menyatakan pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, khususnya Pasal 1 angka 1 menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan



Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hukum pajak, negara mempunyai tempat istimewa terkait penagihan pajak. Pada pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung pajak”<sup>31</sup> Kedudukan *preferen* negara atas penagihan utang pajak dikarenakan proses timbulnya utang pajak yang karena terkait dengan suatu proses dalam hukum publik, dimana timbul jika undang-undang yang menjadi dasar pemungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek dan objektifnya yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama. Syarat objektif dipenuhi apabila keadaan yang nyata yang disebut dalam undang-undang dipenuhi, seperti perbuatan, keadaan dan peristiwa.<sup>32</sup> Selain itu menurut Rochmat Soemitro, hasil dari penagihan pajak digunakan untuk kepentingan umum, melangsungkan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan negara sehingga timbulah hak mendahului bila dibandingkan dengan utang biasa apabila Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya.<sup>33</sup>

### 3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan, ada 2 fungsi pajak yaitu:

a) Fungsi penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pen ngeluaran pemerintah

b) Fungsi Mengatur (Regulerend)

<sup>31</sup> pasal 21 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>32</sup> Jaenadinahmad.blogspot.com diakses pada tanggal 27 mei 2015

<sup>33</sup> *Ibid*, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, 1990.

repository.ub.ac

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi

### 3.3 Asas-asas dalam pemungutan pajak

#### a. Asas domisili ( asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

#### b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

#### c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.<sup>34</sup>

### 3.4 Pembagian Pajak

#### 3.4.1 Berdasarkan Golongan<sup>35</sup>

##### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah salah satu pajak yang diharapkan mempunyai sifat kontinu dan selalu menunjukkan perkembangan, sehingga mempunyai sifat mantap sebagai sumber penerimaan pemerintah. Pajak langsung dapat ditinjau dari tata usaha negara adalah:

- Pajak yang dikenakan atas dasar surat ketetapan pajak (kohir),
- Pengenaannya dilakukan secara berkala (misalnya tiap-tiap tahun atau pada waktu-waktu tertentu)

<sup>34</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2009. hlm. 7

<sup>35</sup> Ibid., hlm 101

Kemudian dilihat dari segi Ekonominya, pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya:

- a) pajak penghasilan perseorangan
- b) pajak penghasilan badan usaha
- c) pajak bumi dan bangunan
- d) pajak deviden dan lain-lain

**b. Pajak tidak langsung**

Pajak yang dimaksudkan untuk dapat digeserkan pada pihak lain.

Pengenaan pajak tidak langsung pada umumnya selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu tindakan ataupun kejadian. Contoh pajak tidak langsung, yaitu:

- a) Pajak pertambahan nilai;
- b) Cukai;
- c) Bea masuk;
- d) Bea ekspor
- e) Bea materai;
- f) Bea balik nama kendaraan bermotor
- g) Bea lelang dan lain-lain.

**3.4.2 Berdasarkan Wewenang Pungutan**

**a. Pajak pusat / Negara**

Pajak yang wewenang pungutannya dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak. Pajak pusat diatur oleh Undang – Undang dan hasilnya akan masuk



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>36</sup> Pajak pusat / Negara yang berlaku saat ini, adalah;

- a) Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-undnag Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PpenjBM) diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- d) Bea Materai diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;
- e) Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan.

**b. Pajak Daerah**

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta terdiri dari 4 (empat) jenis Pajak Daerah Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah selain memungut pajak juga melakukan pemungutan dengan nama retribusi, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 126

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, yang terdiri atas tiga jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah.

### 3.4.3 Berdasarkan Sifat

#### a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan. Dalam pajak subyektif harus memberi pembebasan pajak untuk biaya hidup minimum dan memperhatikan faktor-faktor perseorangan dan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya hidup.

#### c. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Atau dalam pengertian lainya yaitu pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian baru dicari subyeknya baik orang pribadi maupun badan/lembaga. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.<sup>37</sup>

## 4. Kajian Umum Tentang Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.<sup>38</sup> Kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi di bidang Kepabeanan dijalankan oleh

<sup>37</sup> Mardiasmo, op.cit. hlm 6

<sup>38</sup> Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, UU Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 1.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>39</sup> Di era modern, Lembaga Kepabeanan (*customs*) diberi mandat untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, menjadi fasilitator perdagangan, serta melindungi perekonomian nasional dan masyarakatnya.<sup>40</sup> Dasar hukum kepabeanan antara lain;

1. UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2008 Tentang Petunjuk Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009.

Daerah Pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.<sup>41</sup>

## 5. Tagihan Pabean

Pelunasan utang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penetapan (merupakan tagihan atas kekurangan pembayaran hasil dari keputusan pejabat pabean) harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal yang tertera di dalam surat penetapan. Pelunasan utang dimaksud dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dengan menggunakan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan

<sup>39</sup> Indonesia (5), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Pasal 168.

<sup>40</sup> *Customs Environment Scan*, diunduh melalui <http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/customs-environment.aspx> pada tanggal 24 September 2013.

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan



Pajak). Dalam prakteknya tanda bukti pelunasan dikirimkan langsung kepada pejabat pabean yaitu pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang segera memasukkan data tersebut ke sistem komputer pelayanan Bea dan Cukai, dengan demikian proses penagihan terhenti dan pengajuan dokumen pabean berikutnya tidak terblokir. Dalam hal tagihan bea masuk, cukai dan denda administrasi tidak dilunasi setelah tanggal jatuh tempo, maka berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan juga pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah tagihan setiap bulannya. Sanksi administrasi dihitung sejak tanggal jatuh tempo surat penetapan sampai dengan tanggal dilunasinya tagihan dimaksud. Pengenaan bunga d pungut untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, bagian bulan misalnya satu hari, satu minggu dan seterusnya, dihitung satu bulan penuh (2%). Disamping pengenaan bunga seperti yang dijelaskan di atas, terhadap importir yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pelayanan pabean. Sanksi tersebut antara lain berupa pemblokiran pelayanan PIB pada pengajuan berikutnya, tidak diberikan fasilitas penangguhan bea masuk pelayanan segera.<sup>42</sup>

Surat teguran diterbitkan dan disampaikan si penanggung hutang dalam hal tagihan belum dilunasi atau tidak diajukan keberatan. Surat teguran menunjuk surat penetapan yang bersangkutan serta uraian jenis tagihan dan jumlah tagihan. Dalam surat teguran dicantumkan sebuah perhatian dengan mendasar pada pasal 8 Undang-Undang

---

<sup>42</sup>[http://www.bppk.depkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/2014\\_KONSEKUENSI\\_PENETAPAN\\_TARIF\\_DAN\\_NILAI\\_PABEAN.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/2014_KONSEKUENSI_PENETAPAN_TARIF_DAN_NILAI_PABEAN.pdf) diakses pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 21.30.

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dengan demikian setelah lewat jangka waktu yaitu 88 (delapan puluh delapan) hari sejak penerbitan surat penetapan, untuk Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan bunga dilakukan penagihan dengan surat paksa.<sup>43</sup>

## 6. Kajian Umum Tentang Bea Masuk

### 5.1 Definisi Bea Masuk

Pengertian Bea masuk berdasarkan Pasal 1 UU No. 17/2006 perubahan dari UU No. 10/1995 adalah “Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor”. Dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.” Dan kemudian penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengertian impor disini secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut wajib bea masuk. Jadi disini dapat disimpulkan bea masuk merupakan pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas barang-barang yang memasuki daerah pabean. Kemudian *Customs duties* (bea masuk) pada dasarnya merupakan salah satu jenis pungutan pemerintah. *Custom duties* adalah pajak atas lalu lintas barang. Dalam sebuah literatur asing disebutkan bahwa “*a tax on good produced aboard and sold domestically*”<sup>44</sup> Pengertian bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pengertian selanjutnya mengenai Bea adalah pungutan negara yang dilakukan terhadap barang-barang yang masuk dan keluar, ke dan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud untuk dipakai. Wilayah Pabean adalah wilayah dimana berlaku Undang-

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Rosdiana, haula. *Pengantar Perpajakan, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003. Hlm. 72

Undang kepabeanan. Kemudian disini Purwito menjelaskan pengertian bea masuk adalah pungutan yang berasal dari pembayaran atas bea masuk yang terutang berkaitan dengan pemasukan ke dalam daerah pabean.<sup>45</sup>

Penerimaan negara yang tercantum dalam pos bea masuk pada APBN adalah penerimaan yang berasal dari pembayaran bea masuk oleh importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat azas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan, yang mencerminkan peran serta setiap anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui bea masuk, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang – Undang ini merupakan produk nasional yang diharapkan mampu menjawab tuntutan pembangunan.

## 5.2 Fungsi Bea Masuk

Fungsi Bea Masuk antara lain;

- a. Fungsi mengatur (*regukerend*)

Yaitu untuk mengatur perlindungan dan kepentingan ekonomi/industri dalam negeri;

- b. Fungsi *budgetair*

Yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara;

- c. Fungsi demokrasi

Yaitu penetapan besarnya tarif bea masuk melalui DPR;

- d. Fungsi Pemerataan

Untuk pemerataan distribusi pendapatan nasional, mislanya dengan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Purwito, Ali, *Kepabean Konsep dan Aplikasi*, Samudra Ilmu, Jakarta. 2006. HLM. 265



### 5.3 Subjek dan Objek Bea Masuk

Yang menjadi subjek bea masuk adalah pihak yang prinsipnya harus bertanggung jawab atas pembayaran bea masuk kepada negara, yaitu pihak yang mendatangkan barang ke daerah pabean atau importir. Sedangkan yang menjadi objek bea masuk adalah barang yang diimpor.<sup>47</sup>

## 7. Peninjauan Kembali dalam Perkara Kepailitan

### 7.1 Definisi tentang Peninjauan Kembali<sup>48</sup>

Terhadap suatu putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapatlah diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA). Dalam rumusan pasal 14 ayat (1) UUKPKPU. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum luar biasa, dalam sistem hukum Indonesia dikenal ada dua macam upaya hukum, yaitu:

a. Upaya hukum biasa (*ordinary attempt*)

Upaya hukum biasa ini terdiri dari dua tingkatan, antara lain:

(a). Upaya hukum banding di pengadilan tinggi

(b). Upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

b. Upaya hukum luar biasa (*extraordinary attempt*)

Upaya hukum luar biasa ini berupa upaya hukum melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

<sup>46</sup> Hamdy, Hady, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) Hlm. 67

<sup>47</sup> <http://www.beacukai.go.id/> diakses pada 21 Februari 2015

<sup>48</sup> [http://eprints.undip.ac.id/17770/1/Wisnu\\_Ardytia.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17770/1/Wisnu_Ardytia.pdf) diakses pada tanggal 17 Maret 2015, pukul 12.31.

Upaya hukum yang telah dijelaskan tersebut juga dikenal dalam UUKPKPU yaitu adanya upaya hukum biasa dalam UU Kepailitan hanya mengenal satu tingkatan saja yaitu upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Jadi dalam UU Kepailitan tidak mengenal upaya banding di pengadilan tinggi, karena diperlukan proses hukum yang cepat. Oleh karena itu disetiap putusan pengadilan niaga dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Tentang upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, disebutkan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman diatur bahwa:

- (a) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yangbersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undnag.
- (b) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali.

Kemudian dalam sebuah penjelasan pasal 23 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan bahwa;

“Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.”<sup>49</sup>

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang disebut dengan *Inkracht van gewijsde* atas dasar:

<sup>49</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

1. Setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, ditemukan sebuah bukti baru (*novum*): *dan/atau*
2. Adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.<sup>50</sup>

## 7.2 Proses Peninjauan Kembali Dalam Kepailitan

Proses Peninjauan kembali sebagai berikut:

- b. Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan Kembali, paling lama : 1 hari kerja;
- c. Pernyataan peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu: 180 hari kerja; setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (*novum*) disertai dengan alasan Peninjauan kembali;
- d. Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama : 2 hari kerja, setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima;
- e. Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berkas peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung;
- f. Dalam waktu paling lama 30 hari setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung
- g. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan *Soft Copy* masing-masing putusan, apabila tidak diserahkan maka berkas dinyatakan tidak lengkap;

<sup>50</sup> Penjelasan pasal 23 ayat (1) Undnag-Undang Kekuasaan Kehakiman



- h. Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai *Soft Copy*;
- i. Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari sebelum putusan diterima;

Dalam UU Kepailitan menentukan alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan upaya peninjauan kembali secara liminitif. Dalam pasal 295 ayat (2) UUKPKPU, ditentukan alasan atau syarat yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, antara lain:

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terhadap kekeliruan yang nyata.<sup>51</sup>

Dalam UU Kepailitan mengajukan permohonan peninjauan kembali diberi batasan waktu karena proses yang berbeda dengan kasasi perdata biasa, dimana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan ke keadaan semula. Pembatasan tersebut diatur dalam UU Kepailitan, antara lain dalam pasal 296 ayat (1) dan ayat (2) UUKPKPU<sup>52</sup>:

“(1) Apabila yang dijadikan dasar peninjauan kembali berupa bukti baru maka waktu yang diberikan adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.  
(2) Apabila yang dijadikan dasar peninjauan kembali berupa kekeliruan yang nyata, maka waktu yang diberikan adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.”

---

<sup>51</sup> Pasal 295 ayat (2) UUKPKPU

<sup>52</sup> Pasal 296 ayat (1) dan (2) UUKPKPU

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Suatu metodologi adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam setiap penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala tersebut.<sup>1</sup>

### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penelitian yang dilakukan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam aturan perundang-undangan yang ada. Dalam ilmu hukum terdapat dua macam penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif, sedangkan paradigma penelitian ini menggunakan *Statute Approach*.

### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Dalam karya ilmiah ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>2</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*).

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1984), hlm 9.

<sup>2</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118



Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>3</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>4</sup> Bahan-bahan hukum primer dalam skripsi ini berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan bea masuk:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diumumkan pada 30 April Tahun 1847 melalui *Staatsblad* nomor 23 dan berlaku Januari 1848.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778.

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm 141

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 141

- 4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
- 5) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Kemudahan Impor dan Pengawasannya

b. Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- (a) Buku literatur;
- (b) Jurnal-jurnal hukum;
- (c) Pendapat para sarjana;
- (d) Hasil penulisan ilmiah;
- (e) Hasil wawancara dengan narasumber ahli.

Di samping itu, menurut Valerine J.L. Kriekhoff, bahan dokumen sebagai acuan dapat pula digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam undang-undang, buku ilmiah, kontrak, dan putusan pengadilan.<sup>5</sup> Dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian.

---

<sup>5</sup> Valerine J.L. Kriekhoff, *“Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal”*, majalah Era Hukum, Vol. 6, Tahun 2, 1997, hlm. 87.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:<sup>6</sup>

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.
- c. Sumber Bahan Hukum

**D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Dari data-data yang diperoleh kemudian dilakukan secara kualitatif mengenai permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Analisa ini bermanfaat untuk membuat kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini

**E. Teknis Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Intepretasi gramatikal. Metode ini merupakan cara penafsiran untuk mengetahui makna yang terkandung dalam putusan tersebut. Dalam mengungkapkan maknanya disamping harus memenuhi standar logis, juga harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat.

**F. Definisi Konseptual**

a) **Kreditor**

orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang – undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan

b) **Kepabeanan**

---



Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk

c) **Bea masuk**

pungutan yang berasal dari pembayaran atas bea masuk yang terutang berkaitan dengan pemasukan ke dalam daerah pabean

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Gambaran Kasus Kedudukan Kreditur Sebagai Salah Satu Kreditur Atas Piutang Berupa Tagihan Bea Masuk Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013)**

PT. Kizone International merupakan sebuah badan hukum yang berkedudukan di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Perusahaan tersebut memperoleh fasilitas fiskal di bidang Kepabeanan berupa Tempat Penimbunan Berikat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Kemudahan Impor dan Pengawasannya. Adapun fasilitas fiskal yang diperoleh PT. Kizone International tersebut adalah fasilitas berupa penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dengan mekanisme Menkeu sebagai berikut:

- a. setiap barang impor yang nantinya akan diekspor kembali akan diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk dan PDRI.
- b. namun demikian, apabila barang-barang tersebut tidak jadi diekspor tetapi dimasukkan ke Daerah Pabean (pasar domestik) maka Pengusaha wajib melunasi Bea Masuk dan PDRI.

PT. Kizone International yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 13/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 April 2011 dengan amar yang pada intinya menyatakan PT. Kizone International dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Permohonan pailit terhadap PT. Kizone International diajukan oleh PT. Obor Setia Abadi melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena adanya utang jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, PT. Kizone International juga mempunyai utang kepada beberapa kreditor yaitu:

1. PT Bank SBI Indonesia (Bank SBI)
2. PT PNM Venture
3. Kantor Pajak Pratama Penanaman Modal Asing IV (KPP PMA IV)
4. Kantor Pratama Tigaraksa
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang (KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang)
6. PT Obor Setia Abadi
7. PT Hardient Medika Husada
8. PT Multi Service Indonesia
9. PT Selaras Kausa Busana
10. PT Green Textile
11. Green Textile Co.Ltd
12. CV Sari Rasa & Cita Rasa
13. Senajaya
14. PT Tekhan Indonesia selaku kreditor konkuren
15. PT Limas Citra Harapan selaku kreditor konkuren

Setelah dinyatakan pailit, Pengadilan telah menunjuk dan mengangkat Dr. Marsuddin Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim Pengawas, dan Anggi Putra Kusuma, S.H sebagai Kurator. Kurator yang telah dipilih tersebut kemudian berhasil mengumpulkan harta pailit sebesar Rp. 17,745,541,253.00, serta menginventarisir para Kreditor sebagai berikut :



1. Kreditor separatis
  - a. PT BANK SBI INDONESIA dengan tagihan Rp. 26,354,012,026.76
  - b. PT PNM VENTURE CAPITAL dengan tagihan Rp. 1,314,205,217.00
2. Kreditor Preferen
  - a. KPP PMA IV dengan tagihan: Rp. 26,354,012,026.76
  - b. KPP PRATAMA TIGARAKSA dengan tagihan: Rp. 252,198,460.00
  - c. KPPBC TIPE MADYA PABEAN dengan tagihan: Rp 3,045,650,857.00
3. Kreditor Konkuren

13 (tiga belas) Perusahaan dengan total tagihan Rp. 36,399,921,512.48<sup>1</sup>

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar konsisten dengan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka penulis hanya akan menitik beratkan kajian pada pembagian harta pailit yang diperoleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang selaku kantor yang mempunyai tagihan bea masuk dalam kepailitan kasus tersebut.

Dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator telah menyampaikan surat kepada para kreditor PT. Kizone International yang salah satunya adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Tangerang nomor 08B/PAILIT-PT.KI/APK/IV/2011, Perihal: Pemberitahuan Kepailitan, Penyelenggaraan Rapat Kreditor, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Verifikasi Pajak dan Rapat Pencocokan Piutang, tanggal 25 April 2011. Melalui surat tersebut pada intinya Kurator menyampaikan bahwa batas akhir pengajuan tagihan adalah tanggal 13 Mei 2011 jam 09.00 s/d 16.00 WIB.

---

<sup>1</sup> Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) kepailitan PT. Kizone International (dalam pailit) perkara no. 13/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST

Menindaklanjuti surat tersebut, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang segera menyampaikan tagihan sebagai berikut:

1. tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) pada tanggal 2 Mei 2011; dan
2. tagihan sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) pada tanggal 13 Mei 2011.

sehingga total tagihan bea masuk adalah Rp. 3.045.650.857,00 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah). Dengan demikian, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang tidak terlambat dalam menyampaikan tagihan karena dilakukan sebelum batas waktu pengajuan tagihan berakhir.

Atas tagihan-tagihan tersebut, telah dilakukan verifikasi di Pengadilan Niaga pada Rapat Pencocokan Piutang tanggal 27 Mei, 7 Juni, dan 14 Juni 2011, sehingga masuk dalam **Daftar Piutang Tetap Diakui** sebesar Rp 3.045.650.857,00 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 akan langsung dibagi dari harta pailit; sedangkan
- b. tagihan sebesar Rp 2.913.849.857,14 dicadangkan terlebih dahulu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tagihan bea dan cukai dimaksud, dan/atau setidaknya-tidaknya melalui sidang keberatan atas daftar pembagian ini dapat ditetapkan atas besarnya tagihan dari bea dan cukai tersebut.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 192, telah memberi kesempatan bagi para Kreditor untuk

melakukan perlawanan terhadap **Daftar Piutang Tetap Diakui** kepada Pengadilan Niaga. Atas dasar tersebut, beberapa kreditor telah mengajukan upaya hukum keberatan yaitu:

- a. PT. Bank SBI Indonesia;
- b. Kantor Pajak Pratama Penanaman Modal Asing IV;
- c. KPPBC TMP A Tangerang;
- d. CV. Sari Rasa dan Cita Rasa;
- e. PT. Green Textile;
- f. Green Textile Co. Ltd.;
- g. PUT TSK SPSI PT. Kizone International;

Dalam keberatannya, KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang telah meminta kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan agar Pengadilan memerintahkan kurator untuk memverifikasi ulang tagihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sebesar Rp 2.913.849.857,14 sehingga seluruh tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 3.045.650.857,00 dapat terlunasi. Pada tanggal 23 Februari 2012 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan tuntutan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang dengan amar yang salah satunya menyatakan “*memerintahkan kurator untuk memverifikasi ulang tagihan KPPBC TMP A Tangerang sebesar Rp 2.913.849.857,14*”.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 196 ayat (1), telah memberi kesempatan bagi para Kreditor untuk melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap putusan keberatan. Dalam kasus ini, terdapat dua kreditor yang mengajukan kasasi yaitu PT. Bank SBI dan Kantor Pajak Pratama Penanaman Modal Asing IV. Dalam pengajuan permohonan kasasi Para Pihak Dalam Kasasi



diajukan oleh PT. Bank SBI Indonesia, suatu perseroan yang berkedudukan di Graha Mandiri Floor 1st, 11th & 15th, Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat. PT. Bank SBI Indonesia adalah kreditor pemegang hak tanggungan atas utang PT. Kizone International sebesar Rp. 26,354,012,026.76. Selain itu, kasasi juga diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat yang berkedudukan di Komplek Kantor Pajak Kalibata Gedung D, Jalan Taman Makan Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, selaku kreditor yang mempunyai tagihan sebesar Rp. Rp. 26,354,012,026.76.

Kasasi tersebut diajukan terhadap Kurator PT. Kizone International (dalam pailit) yang berkedudukan di kantor dahulu Gedung Graha Eka Formula, 3th floor, 305 suite, jalan bangka raya nomor. 02 Kemang, Jakarta Selatan, sekarang berkedudukan di Jalan Tebet Barat IX, No. 76 Tebet, Jakarta Selatan, serta:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang, selaku Kreditor Preferen;
2. CV Sari Rasa dan Cita Rasa, selaku Kreditor Konkuren;
3. Green Textile, selaku kreditor Konkuren;
4. PT. Green Textile CP Ltd, selaku kreditor Konkuren;
5. PUK SP TSK-SPSI PT. Kizone International (dalam pailit) selaku kreditor preferen.

Diajukan permohonan kasasi dikarenakan adanya PT. Bank SBI Indonesia merasa keberatan terhadap pencadangan Terlawan sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) kepada KPBCC Tipe Madya Pabean A Tangerang karena pencadangan uang tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Atas permohonan tersebut, telah dijatuhkan putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap Nomor Nomor Nomor 252 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 September 2012. Pada intinya dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang berhak atas tagihan sebesar **Rp 3.045.650.857,14** (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen).

Atas putusan Kasasi tersebut beberapa kreditor yaitu PT. Bank SBI Indonesia dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Kurator PT. Kizone International (dalam pailit), serta:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang, selaku Kreditor Preferen;
2. CV Sari Rasa dan Cita Rasa, selaku Kreditor Konkuren;
3. Green Textile, selaku kreditor Konkuren;
4. PT. Green Textile CP Ltd, selaku kreditor Konkuren;
5. PUK SP TSK-SPSI PT. Kizone International (dalam pailit) selaku kreditor preferen.

Peninjauan kembali dilakukan apabila pihak yang bersangkutan tidak atau belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang isi putusannya sebagai berikut<sup>2</sup>:

“Atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, khususnya alasan yang diajukan oleh PT. Bank SBI Indonesia, bahwa Alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 Maret 2013 dihubungkan dengan

<sup>2</sup> putusan Peninjauan Kembali Nomor: 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya PT. Kizone/Pelawan VII memiliki hutang pada Pemohon Peninjauan Kembali I sebesar Rp 26.354.012.026,76 dengan jaminan Sertifikat Hak Tanggungan yang telah dilelang sejumlah Rp25.515.000.000,00 sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali I hanya mendapat pembagian Rp10.325.219.087,73 yang selebihnya untuk buruh Rp6.427.153.433,00, Kurator Rp2.041.200.000,00 dan PPN Rp637.875.000,00, yang keseluruhannya berjumlah Rp19.431.447.520,73, yang berarti masih ada kelebihan yang harus menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali I, yaitu Rp25.515.000.000,00 dikurangi Rp19.431.447.520,73 yaitu Rp6.083.552.479,27 yang harus diserahkan pada Pemohon Peninjauan Kembali I;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I PT. BANK SBI INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 September 2012 Jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut;

**Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I PT. BANK SBI INDONESIA tersebut;**



Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 September 2012 Jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2012.”

Sehingga yang pada intinya telah membatalkan Kasasi Nomor Nomor 252 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 September 2012 sehingga telah menghilangkan seluruh bagian kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang.

## **B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 252K/PDT.SUS/2012 Sesuai Dengan Hukum Positif Di Indonesia**

### **B.1 Keberatan Atas Bagian KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang**

Dalam bagian ini, penulis hanya menganalisa keberatan para pemohon kasasi yang terkait langsung dengan pembagian harta pailit yang diterima oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, sehingga terkait keberatan lainnya tidak perlu dibahas lebih lanjut.

PT. Bank SBI Indonesia adalah satu-satunya kreditur yang menyatakan keberatan terhadap bagian harta pailit yang diterima oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang. Berikut disampaikan argumentasi PT. Bank SBI Indonesia guna memperkuat keberatannya tersebut.

PT. Bank SBI Indonesia merasa keberatan terhadap pencadangan Terlawan sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) kepada KPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang karena pencadangan uang tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PT. Bank SBI Indonesia menganggap sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-13/BC/2008 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

(“Peraturan Dirjen BC No. 13”) secara tegas telah mensyaratkan bahwa Penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang berbentuk Surat Penetapan Pabean (“SPP”) harus didahului dengan suatu audit dan selanjutnya hasil audit tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit (“LHA”). Pelaksanaan Audit terhadap wajib pajak tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Dirjen BC P-13/BC/2008.

Secara terperinci PT. Bank SBI Indonesia menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten telah menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP-28/WBC.06/2010 yang ditujukan kepada kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) untuk membayar tagihan pabean sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) adalah terdiri dari :

- a Bea Masuk : Rp 39.052.000,00 ;
- b Cukai : Rp 0,00 ;
- c PPN Impor : Rp 42.957.000,00 ;
- d PPnBM : Rp 10.720.000,00 ;
- e PPh Pasal 22 : Rp 39.052.000,00 ;
- Jumlah : Rp 131.801.000,00 ;

Bahwa dasar diterbitkannya SPP-28/WBC.06/2010 adalah adanya Laporan Hasil Audit No. LHA-41/WBC.06/PKB-PDKB/2010 tanggal 28 September 2010 dimana PT. Kizone International (Dalam Pailit) diwajibkan membayar tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Besarnya tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh PT.

Kizone International (Dalam Pailit) kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya surat teguran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Banten Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang yang ditujukan kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebagaimana terbukti dari Surat Teguran Nomor : S-05/WBC.06/KPP. MP.03/2011 tertanggal 2 Mei 2011 yang secara tegas menyatakan bahwa PT. Kizone International (Dalam Pailit) masih memiliki tagihan yang harus dilunasi sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Jumlah tagihan dalam Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/ 2011 merujuk pada SPP-28/WBC.06/2010. Setelah adanya Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP. 03/2011 yang berisi kewajiban PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah), namun ternyata pada tanggal 13 Mei 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Kantor Wilayah Banten Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang kembali menerbitkan Surat Penetapan Pajak (SPP) No : SPP-02/WBC.06/KPP.MP.03/2011 yang ditujukan kepada kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) dengan jumlah yang berkali-kali lebih besar dari tagihan semula yang hanya sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen). Komponen yang ditagihan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang dalam SPP-02/WBC.06/KPP terdiri dari :

- a Bea Masuk : Rp 863.064.482,00 ;
- b PPN : Rp 1.640.628.308,00 ;
- c PPH Pasal 22 : Rp 410.157.085,00 ;



Jumlah : Rp Rp 2.913.849.857,14 ;

Biaya-biaya yang terdapat dalam komponen di atas adalah biaya-biaya yang sudah ditagihkan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sebagaimana dalam Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 yang jumlah tagihan keseluruhannya hanya sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Namun hanya dalam hitungan 11 (sebelas) hari, KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang kembali menagihkan kepada kurator biaya pajak yang harus dibayar oleh PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen).

Terbitnya 2 (dua) surat tersebut yaitu Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 dan SPP-02/WBC.06/ KPP.MP.03/2011 dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang yang keduanya menagihkan komponen yang sama dan masing-masing hanya berjarak 11 (sebelas) hari antara satu dengan yang lainnya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan PT. Bank SBI Indonesia.

Penerbitan SPP-02/WBC.06/ KPP.MP.03/2011 yang menagihkan biaya pajak kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) tidak memenuhi syarat sebagai suatu SPP yang sah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dirjen BC No. 13 karena tagihan pajak yang ada di dalam SPP-02/WBC.06/ KPP.MP.03/2011 sama tidak mendasarkan pada adanya LHA. Sebagaimana uraian Pelawan pada butir II.1.3. di atas, LHA merupakan syarat utama dan dasar hukum agar SPP bisa diterbitkan, dengan demikian biaya pajak yang muncul berdasarkan SPP-02/WBC.06/ KPP.MP.03/2011 sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak dan oleh karena itu kurator tidak

perlu mencadangkan biaya sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) untuk KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, namun demi hukum seharusnya diberikan kepada PT. Bank SBI Indonesia sebagai bagian dari penjualan aset yang dijaminan oleh PT. Kizone International (Dalam Pailit) kepada PT. Bank SBI Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PT. Bank SBI Indonesia berkesimpulan bahwa tindakan kurator yang mencadangkan uang sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) tidak berdasarkan hukum karena tagihan yang disampaikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sama sekali tidak berdasar hukum karena telah melanggar Peraturan Dirjen BC No. 13. Pasal 40 A ayat 1 huruf b dan ayat 3 huruf a. Oleh karenanya itu, PT. Bank SBI Indonesia meminta agar Majelis Hakim membatalkan Cadangan Biaya dimaksud dan diberikan kepada PT. Bank SBI Indonesia selaku Kreditor Separatis.

## **B.2. Pertimbangan Majelis Hakim**

Atas alasan-alasan yang diajukan dalam memori kasasi tersebut, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya memerintahkan agar Termohon Kasasi I melakukan verifikasi ulang atas tagihan termohon Kasasi III padahal seharusnya verifikasi ulang tidak perlu karena uang sebesar Rp 2.910.814.849.857,14 sudah jelas merupakan hak dari pemohon kasasi
- b. Bahwa walaupun benar tagihan dari Termohon Kasasi III adalah sebesar Rp 2.910.814.849.857,14 maka tagihan termohon kasasi II tersebut merupakan tagihan yang tidak berdasar dan harus ditolak karena tagihan tersebut tidak berdasar pada laporan audit.



- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-4/BC/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-13/BC/2008 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai ('Peraturan Dirjen BC No. 13) secara tegas telah mensyaratkan bahwa Penempatan Pejabat Bea dan Cukai yang berbentuk Surat Penetapan Pabean (SPP) harus didahului dengan suatu audit dan selanjutnya hasil audit tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Ausit (LHA).
- d. Bahwa dasar diterbitkannya SPP-28/WBC.0/2010 adanya laporan Hasil Audit dimana PT. Kizone International diwajibkan membayar tagihan sebesar Rp 131.801.000,00
- e. Kemudian tagian terebut dipertegas lagi dengan terbitnya surat Teguran pada tanggal 2 Mei 2011 dariTermohon Kasasi III nomor : S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 yang ditujukan kepada PT Kizone International.
- f. Bahwa seteah munculnya surat teguran, diterbitkan Surat Penetapan Pajak (SPP) sehingga tagihan yang awalnya sebesar Rp 131.801.000,00 bertambah menjadi Rp 2.913.849.875.000,00

### **B.3. Bunyi Putusan**

Atas permohonan kasasi tersebut, Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi yang terdiri dari H. Muhammad Taufik, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM., dan H. Djafni Djamal, SH. MH., berpendapat sebagaimana berikut:

Pertama, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I (PT. Bank SBI Indonesia) tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Kedua, pertimbangan tersebut di



atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi PT. Bank SBI Indonesia tersebut harus ditolak. Ketiga, oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Sehingga inti dalam putusan yaitu Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi PT. BANK SBI INDONESIA dan II. KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut

#### **B.4. Analisis Putusan Kasasi**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 252 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 September 2012 tersebut telah tepat dan berdasar hukum. Putusan kasasi tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara sah di dalam persidangan renvoi prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 dan Rp 2.913.849.857,14 atau sejumlah Rp 3.045.650.857,14 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) telah diajukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam proses pemberesan harta pailit, yaitu tepat pada tanggal 13 Mei 2011.

Selain itu, Pengadilan di tingkat pertama yang menyatakan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang berhak atas seluruh tagihannya sebesar Rp 3.045.650.857,14 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) adalah suatu hal yang sangat beralasan dan berdasar hukum. KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang merupakan kreditur yang mempunyai kedudukan istimewa berdasarkan undang-

undang. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan:

*“(1) Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang berutang.*

*(2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan.”*

Dalam kedudukannya tersebut, KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang merupakan kreditor preferen yang mempunyai hak mendahului atas tagihan-tagihan kreditor lainnya sesuai dengan Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa;

*“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badam umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai Undang-Undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam Undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan”.*

Dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menyetujui seluruh tagihan Bea Masuk yang ditagih KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sebesar Rp 3.045.650.857,14 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada;

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

*“(1) Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang berutang.*

*(2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan.”*

3. pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

*“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badam umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaanya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai Undang-Undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam Undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan”<sup>4</sup>*

### **C. Analisis Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-Pailit/2013**

#### **C.1. Keberatan Atas Bagian KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang**

Dalam bagian ini, penulis hanya menganalisa keberatan para pemohon Peninjauan Kembali yang terkait langsung dengan pembagian harta pailit yang diterima oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, sehingga terkait keberatan lainnya tidak perlu dibahas lebih lanjut.

Dalam Peninjauan Kembali tersebut, PT. Bank SBI Indonesia adalah satu-satunya kreditur yang menyatakan keberatan terhadap bagian harta pailit yang diterima oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang. Berikut disampaikan argumentasi PT. Bank SBI Indonesia yang tercantum dalam putusan peninjauan kembali nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 guna memperkuat keberatannya tersebut.

Bahwa Putusan Pengadilan Niaga yang memerintahkan kurator untuk memverifikasi ulang tagihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang adalah keliru, Majelis Putusan

---

<sup>4</sup> Pasal 1137 KUHPer



Pengadilan Niaga hanya mengambil bulat-bulat permohonan dari kurator tanpa mempertimbangkan lagi fakta dan ketentuan hukumnya;

Bahwa verifikasi ulang terhadap tagihan sebesar Rp2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) adalah sangat tidak diperlukan lagi, karena terhadap tagihan tersebut telah dilakukan verifikasi ulang oleh kurator. Dimana verifikasi pertama dilakukan pada saat Rapat Pencocokan Piutang tanggal 27 Mei, 7 Juni dan 14 Juni 2011, kemudian verifikasi ulang telah dilakukan oleh kurator setelah menemukan beberapa dokumen di ruang Ekspor Impor pada Kantor Eks Pabrik PT. Kizone International (Dalam Pailit) pada tanggal 13 Oktober 2011. Dimana fakta-fakta tersebut diakui oleh kurator dalam jawaban-jawabannya di persidangan dan kemudian dimuat pada halaman 40 sampai dengan 42 dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 252 K/Pdt.Sus/2012;

Bahwa pada intinya, hasil verifikasi ulang Termohon Peninjauan Kembali terhadap tagihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sebesar Rp2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) mendapatkan fakta dokumen-dokumen penagihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang adalah tidak didasarkan pada audit terakhir, akan tetapi hanya mendasarkan pada Berita Acara Stock Opname Barang, mengingat permintaan audit dari KPPBC Tipe Madya Pabean tidak dapat dilakukan karena pihak manajemen sudah tidak ada lagi;

Bahwa secara jelas telah dilakukan verifikasi ulang oleh kurator dan ditemukan fakta atas Surat Penetapan Pabean ("SPP") KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sebesar Rp2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) tidak didasarkan kepada

Laporan Hasil Audit ("LHA"), dimana LHA adalah merupakan syarat utama dan dasar hukum agar SPP bisa diterbitkan, sehingga SPP yang diterbitkan tanpa adanya LHA adalah tidak sah. Ketentuan tentang keharusan adanya LHA sebelum diterbitkannya SPP diatur dalam Pasal 40 A ayat (1) huruf b dan ayat 3 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-4/BC/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai ("Peraturan Dirjen BC Nomor 4");

Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan verifikasi ulang adalah sudah tidak diperlukan lagi, karena apalagi yang hendak diverifikasi ulang dan dibuktikan oleh kurator mengingat SPP KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sebesar Rp2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) tidak didasarkan kepada LHA, sementara LHA tidak mungkin dapat dilakukan lagi, karena pihak manajemen PT. Kizone International (Dalam Pailit) sudah tidak ada lagi. Sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Dirjen BC Nomor 4, SPP KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang tersebut adalah tidak sah dan harus ditolak;

Bahwa walaupun benar tagihan dari KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang adalah sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen), quad non, maka tagihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang tersebut merupakan yang tidak berdasar dan harus ditolak karena apabila terjadi eksekusi hak para Kreditor Separatis yang penjualan asetnya dilakukan oleh kurator sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan, maka berdasarkan azas yang berlaku bagi Hak Jaminan (kebendaan) dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan 59 ayat (2) UU Kepailitan, Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal



21 UU Hak Tanggungan, sebagaimana telah diuraikan di atas, kedudukan (kualifikasi) tagihan pajak yang tidak termasuk dalam kualifikasi biaya kepailitan kedudukannya sebagai kreditor preferen berada di bawah Kreditor Separatis;

Bahwa pada proses kepailitan PT. Kizone International (Dalam Pailit) kondisi hasil penjualan aset pabrik PT. Kizone International (Dalam Pailit) setelah dipotong dengan biaya perkara, biaya kepailitan dan fee kurator tidak terdapat sisa bagian yang dapat diberikan kepada kreditor-kreditor lainnya termasuk kepada SPP KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, malahan masih terdapat sisa hutang yang masih yang menjadi hak PT. Bank SBI Indonesiadan belum terbayar oleh kurator. Oleh sebab itu, secara hukum Majelis Putusan Judex Facti tidak dapat memberikan bagian/mencadangkan hasil penjualan kepada tagihan SPP KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, karena merupakan hak dari Pemohon PK;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PT. Bank SBI Indonesia memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Judex Facti perihal pencadangan uang sebesar Rp2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) yang kemudian akan dilakukan verifikasi ulang terhadap tagihan SPP KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, karena pencadangan itu tidak perlu karena telah dilakukan verifikasi ulang sebelumnya oleh kurator dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kembali uang sebesar Rp2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) itu kepada PT. Bank SBI Indonesia sebagai pihak yang memiliki hak secara hukum;



Berdasarkan seluruh uraian di atas PT. Bank SBI Indonesia menganggap Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dengan mencadangkan uang untuk memverifikasi ulang tagihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang karena sebelumnya telah dilakukan verifikasi ulang oleh kurator dan secara hukum merupakan hak kreditor separatis mengingat tidak ada sisa uang yang dapat dibagi kepada kreditor-kreditor lain termasuk kepada KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang;

### **C.2. Pertimbangan Majelis Hakim**

Atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, khususnya alasan yang diajukan oleh PT. Bank SBI Indonesia, bahwa Alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya PT. Kizone/Pelawan VII memiliki hutang pada Pemohon Peninjauan Kembali I sebesar Rp 26.354.012.026,76 dengan jaminan Sertifikat Hak Tanggungan yang telah dilelang sejumlah Rp25.515.000.000,00 sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali I hanya mendapat pembagian Rp10.325.219.087,73 yang selebihnya untuk buruh Rp6.427.153.433,00, Kurator Rp2.041.200.000,00 dan PPN Rp637.875.000,00, yang keseluruhannya berjumlah Rp19.431.447.520,73, yang berarti masih ada kelebihan yang harus menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali I, yaitu Rp25.515.000.000,00 dikurangi Rp19.431.447.520,73 yaitu Rp6.083.552.479,27 yang harus diserahkan pada Pemohon Peninjauan Kembali I;

### **C.3. Bunyi Putusan**

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I PT. BANK SBI INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 September 2012 Jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini; Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut; **Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I PT. BANK SBI INDONESIA tersebut** Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 September 2012 Jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2012;

#### C.4. Analisis Putusan Peninjauan Kembali

Sebagaimana uraian sebelumnya, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan peninjauan kembali nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 26 Juni 2014, yang pada intinya telah **mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PT. Bank SBI Indonesia** sehingga terjadi perubahan besaran pembagian harta pailit PT. Kizone International dalam Daftar Pembagian Harta Pailit sebagai berikut:

Tabel 1.1

No.	Kreditor	Pembagian	Tagihan	Status
-----	----------	-----------	---------	--------

1.	PT. Bank SBI	Rp 19.192.372.225,90	Rp 26.354.012.026,76	Separatis
2.	KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang	<b>Rp 0,00</b>	Rp 3.045.650.857,14	<b>Preferen</b>

Sebelumnya, sesuai Daftar Pembagian Harta Pailit yang telah dibuat oleh Kurator dan disahkan oleh Hakim Pengawas, bagian PT. SBI, Bea Cukai (Bea Masuk), dan biaya kepailitan serta fee kurator adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

No.	Kreditur	Pembagian	Status
1.	PT. Bank SBI	Rp. 13.108.819.746,63	Separatis
2.	KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang	<b>Rp. 3.045.650.857,00</b>	<b>Preferen</b>

Bahwa dengan putusan peninjauan kembali tersebut, Bea dan Cukai (dhi. KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang) yang berdasarkan undang-undang nyata-nyata berkedudukan sebagai kreditur preferen justru sama sekali tidak mendapatkan bagian sama sekali.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, UU Kepailitan, secara tegas mengakui eksistensi kreditur preferen sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan "Kreditur" dalam ayat ini adalah baik **kreditur konkuren**, **kreditur separatis** maupun **kreditur preferen**. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak*



agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan”.<sup>5</sup>

Keutamaan kreditor preferen diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata yang menyatakan:

*“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.*

Bea Masuk yang dipungut oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, merupakan hak istimewa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan:

- “(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang berutang.*
- (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan.”*

Berdasarkan dasar hukum tersebut, seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut di tingkat peninjauan kembali, seharusnya menegakkan kepastian hukum karena sesuai ketentuan UU Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pajak (termasuk bea masuk) adalah tagihan yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan dibandingkan tagihan-tagihan lainnya. Dengan logika demikian maka tidak mungkin tagihan bea masuk justru tidak mendapat bagian sedikitpun dalam pembagian harta pailit.

---

<sup>5</sup> Ibid., Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini di tingkat peninjauan kembali juga seharusnya menegakkan prinsip keadilan, karena ternyata ada kreditur preferen dari kantor pajak lainnya, yaitu KPP PRATAMA TIGARAKSA yang memperoleh bagian 100% dari tagihan sebesar Rp. 252.198.460,00. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Peninjauan Kembali nyata-nyata telah menciderai prinsip keadilan, karena adanya perbedaan perlakuan antara tagihan bea masuk dengan tagihan pajak lainnya.

Selain itu, apabila dianalisis dari segi substansi, putusan Peninjauan Kembali tersebut juga mengandung kekeliruan yang nyata karena Majelis Hakim Agung telah salah dalam menilai pokok tuntutan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Bank SBI Indonesia. Kekeliruan pertama muncul karena Majelis Hakim Agung telah melakukan ultra petita dalam putusannya. Sebagaimana petitum permohonan peninjauan kembali, PT. Bank SBI Indonesia hanya mempermasalahkan bagian KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sebesar Rp 2.913.849.857,14 dari seluruh tagihan yang disetujui sebesar Rp 3.045.650.857,14 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen). Artinya ada selisih sebesar Rp 131.801.000,00 yang sebetulnya tidak dipermasalahkan oleh PT. Bank SBI Indonesia, namun juga dihilangkan oleh Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang mengajukan 2 (dua) tagihan pada saat rapat pencocokan piutang, yaitu tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) pada tanggal 2 Mei 2011 dan tagihan sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) pada tanggal 13 Mei 2011, sehingga total tagihan bea masuk adalah Rp. 3.045.650.857,00 (tiga miliar



empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah). Seluruh tagihan tersebut diajukan sebelum batas waktu pengajuan tagihan berakhir. Kedua tagihan tersebut diakui oleh kurator dan berdasarkan Daftar Pembagian Harta Pailit, seluruh tagihan tersebut disetujui untuk dibayarkan dari harta pailit. Hal tersebut diperkuat oleh putusan renvoi prosedur di tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan tuntutan PT. Bank SBI Indonesia dalam permohonan Peninjauan Kembalinya yang hanya mempermasalahkan sebagian dari seluruh tagihan yang ditujukan kepada PT. Kizone International, yaitu Rp 2.913.849.857,14 dari Rp. 3.045.650.857,00, dan dikaitkan dengan putusan Peninjauan Kembali yang telah menghilangkan seluruh hak KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut di atas telah mengandung kekeliruan yang nyata. Seharusnya, apabila Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan tuntutan PT. Bank SBI Indonesia, maka KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang tetap berhak atas bagian yang tidak dituntut yaitu sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah).

Dengan dihilangkannya seluruh hak KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang maka adanya salah satu asas kepailitan yang hilang yaitu asas keadilan bagi pihak Bea Cukai akan hak Negara yang seharusnya di dapatnya dimana dalam kepailitan mengandung ketentuan bahwa rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas ini mencegah terjadinya kewenangan-kewenangan pihak lain yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur tanpa mempedulikan kreditor lainnya.



Berdasarkan kajian tersebut, ada dua kesalahan Mahkamah Agung yang terjadi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, yaitu:

Mahkamah Agung telah memutus lebih dari apa yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*ultra petita*);

Putusan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya khususnya pada;

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik **kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen**. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan”*.<sup>6</sup>

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

*“(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang berutang.*

*(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan.”*

Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

*“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badam umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaanya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai Undang-Undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam Undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan”*<sup>7</sup>

## TABEL PUTUSAN

<sup>6</sup> Ibid., Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

<sup>7</sup> Pasal 1137 KUHPer

Upaya hukum	Nomor putusan	Isi Keberatan	Inti putusan
Kasasi	Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 252K/PDT.SUS/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Bank SBI Indonesia merasa keberatan terhadap pencadangan Terlawan sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) kepada KPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang karena pencadangan uang tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</li> <li>2. PT. Bank SBI Indonesia menganggap sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-13/BC/2008 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai ("Peraturan Dirjen BC No. 13") secara tegas telah mensyaratkan bahwa Penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang berbentuk Surat Penetapan Pabean ("SPP") harus didahului dengan suatu audit dan selanjutnya hasil audit tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit ("LHA"). Pelaksanaan Audit terhadap wajib pajak tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Dirjen BC P-13/BC/2008.</li> <li>3. tindakan kurator yang mencadangkan uang sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga</li> </ol>	permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Sehingga inti dalam putusan yaitu Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi PT. BANK SBI INDONESIA dan II. KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut.



		<p>belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) tidak berdasarkan hukum karena tagihan yang disampaikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sama sekali tidak berdasar hukum karena telah melanggar Peraturan Dirjen BC No. 13. Pasal 40 A ayat 1 huruf b dan ayat 3 huruf a</p>	
<p>Peninjauan Kembali</p>	<p>Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan Pengadilan Niaga yang memerintahkan kurator untuk memverifikasi ulang tagihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang adalah keliru, Majelis Putusan Pengadilan Niaga hanya mengambil bulat-bulat permohonan dari kurator tanpa mempertimbangkan lagi fakta dan ketentuan hukumnya</li> <li>2. hasil verifikasi ulang Termohon Peninjauan Kembali terhadap tagihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang sebesar Rp2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) mendapatkan fakta dokumen-dokumen penagihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang adalah tidak didasarkan pada audit terakhir</li> <li>3. verifikasi ulang oleh kurator dan ditemukan fakta atas Surat Penetapan Pabean ("SPP") KPPBC Tipe Madya Pabean A</li> </ol>	<p>Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut; <b>Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I PT. BANK SBI INDONESIA tersebut</b> Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 September 2012 Jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2012;</p>



		Tangerang sebesar Rp2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) tidak didasarkan kepada Laporan Hasil Audit ("LHA")	
--	--	---	--

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

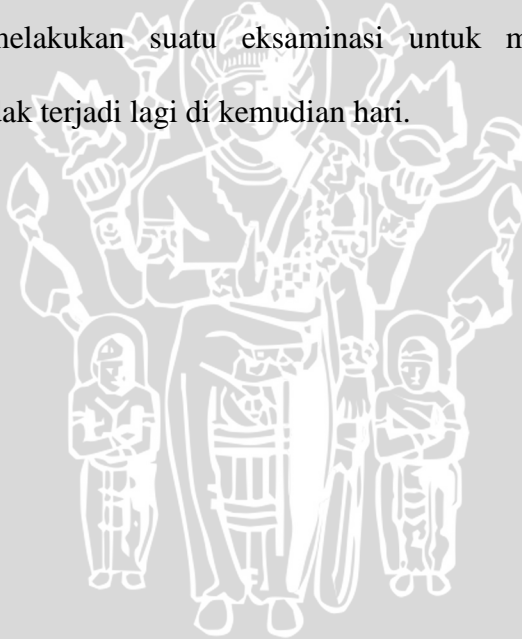
#### Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah pada bab I dan uraian pembahasan pada bab II s/d bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 252 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 September 2012 telah tepat dan berdasar hukum. Putusan kasasi tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara sah di dalam persidangan renvoi prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 mengandung dua kekeliruan yang sangat fatal, yaitu:  
Putusan Peninjauan Kembali telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta asas-asas yang berlaku dalam hukum kepailitan, karena tidak memberikan bagian harta pailit kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang selaku organ negara berstatus sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa berdasarkan undang-undang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya.

**SARAN:**

- a. Sebagai puncak dari seluruh lingkungan peradilan yang berada di Indonesia maka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kepailitan, Mahkamah Agung hendaknya tetap konsisten dalam menerapkan peraturan perundanga-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku sehingga dapat dihindari terjadinya kekeliruan dalam putusan yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah.
- b. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Mahkamah Agung perlu membuat suatu trobosan hukum untuk memulihkan kekeliruan yang telah dilakukannya atau setidaknya melakukan suatu eksaminasi untuk menghindari terjadinya kekeliruan serupa agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004

Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi; Yogyakarta, 2009

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, USA; West Group, 7th ED, 1999

Edi Soepangat, Haposan Lumban Gaol, *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1991

Hamdy, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004

Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, 2007

M. Hadi Shubhan, *Hukum Pailit: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008

Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung; Alumni, 2003

Man S. Satrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2006

Mardiasno, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2009.

Munir Fuady, *Pengantar Huukum Bisnis*, Bandung: Aditya Bakti, 2001

Purwito Ali, *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*, Jakarta; Samudra Imu, 206

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Intermasa, 1995

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi revisi berdasarkan Undnag-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, 2008

Rosdiana Haula, *Pengantar Perpajakan, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Jakarta; PT Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003

Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, 1996

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; Alumni, 1986

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 1984

**Artikel:**

Valerine J.L. Kriekhoff, "*Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal*", majalah Era Hukum, Vol. 6, Tahun 2, 1997

**Undang-Undang:**

KUH Perdata

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009

Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Tentang Kepabeanan, UU Nomor 10 Tahun 1995, LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor 16 Tahun 2009

**Peraturan:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan

**Internet:**

<http://www.beacukai.go.id/>

[http://www.bppk.depkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/2014\\_KONSEKUENSI\\_PENETAPAN\\_TARIF\\_DAN\\_NILAI\\_PABEAN.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/2014_KONSEKUENSI_PENETAPAN_TARIF_DAN_NILAI_PABEAN.pdf)

Albert Richi Aruan, *Kedudukan Negara atas Utang Pajak PT. ARTIKA OPTIMA INTI dalam Kasus Kepailitan*, Tesis tidak diterbitkan, 2010, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 49

[http://eprints.undip.ac.id/17770/1/Wisnu\\_Ardytia.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17770/1/Wisnu_Ardytia.pdf)

Jaenadinahmad.blogspot.com

**Skripsi:**

Albert Richi Aruan, *Kedudukan Negara atas Utang Pajak PT. ARTIKA OPTIMA INTI dalam Kasus Kepailitan*, Tesis tidak diterbitkan, 2010, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 49

[http://eprints.undip.ac.id/17770/1/Wisnu\\_Ardytia.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17770/1/Wisnu_Ardytia.pdf)

**Makalah:**

Kartini Mulyadi, "Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan" (Makalah Seminar tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 29 April 1998

Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya:: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005